

AUDIT SISTEM INFORMASI TERHADAP IT GOVERNANCE DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN MODEL REFERENSI COBIT

Fahrizal Wahyudi¹, Muhammad Jibril²

^{1,2}Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Islam Indragiri,

Email: fahrizalwahyudi2504@gmail.com¹, jibril.unisi@gmail.com²

ABSTRAK

Audit sistem informasi memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas tata kelola teknologi informasi (IT Governance) di dalam organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pengelolaan sistem informasi dengan prinsip tata kelola TI menggunakan pendekatan model referensi COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*). Isu utama yang diangkat meliputi rendahnya efisiensi proses TI, lemahnya kontrol internal, dan kurang optimalnya pencapaian tujuan strategis TI. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang diterapkan pada sebuah institusi pendidikan tinggi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen internal, kemudian dievaluasi menggunakan domain dan proses dalam kerangka COBIT 5, khususnya pada area EDM (*Evaluate, Direct and Monitor*) dan MEA (*Monitor, Evaluate and Assess*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas beberapa proses TI masih berada pada level 2 (*managed*), yang berarti pengelolaan telah dilakukan tetapi belum terdokumentasi secara optimal dan tidak konsisten. Rekomendasi perbaikan difokuskan pada peningkatan dokumentasi, pemantauan rutin, dan integrasi antara kebijakan TI dengan tujuan strategis institusi. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan COBIT sebagai alat audit mampu memberikan gambaran objektif terhadap kondisi tata kelola TI yang ada.

Kata Kunci: Audit Sistem Informasi, Tata Kelola TI, COBIT, IT Governance, Evaluasi TI

ABSTRACT

Information system audits play an important role in ensuring the effectiveness of information technology governance (IT Governance) within an organization. This study aims to evaluate the suitability of information system management with IT governance principles using the COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*) reference model approach. The main issues raised include low IT process efficiency, weak internal control, and less than optimal achievement of IT strategic objectives. This study uses a case study method with a qualitative descriptive approach, which is applied to a higher education institution. Data collection was carried out through interviews, observations, and internal document analysis, then evaluated using domains and processes in the COBIT 5 framework, especially in the EDM (*Evaluate, Direct and Monitor*) and MEA (*Monitor, Evaluate and Assess*) areas. The results of the study indicate that the capability level of several IT processes is still at level 2 (*managed*), which means that management has been carried out but has not been optimally documented and is inconsistent. Recommendations for improvement are focused on improving documentation, routine monitoring, and integration between IT policies and the institution's strategic objectives. These findings indicate that the use of COBIT as an audit tool is able to provide an objective picture of the existing IT governance conditions.

Keywords: Information System Audit, IT Governance, COBIT, IT Governance, IT Evaluation

1 PENDAHULUAN

Penerapan teknologi informasi (TI) di berbagai sektor telah menjadi kebutuhan mendasar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing organisasi. Namun, tingginya ketergantungan pada sistem informasi justru meningkatkan risiko operasional apabila tidak diiringi dengan sistem pengendalian dan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, audit sistem informasi menjadi alat penting untuk menilai sejauh mana penerapan TI mendukung tujuan strategis organisasi secara efektif dan efisien (Gelinas, Dull, & Wheeler, 2018).

Seiring dengan perkembangan sistem informasi yang semakin kompleks, banyak organisasi menghadapi tantangan dalam menjaga keselarasan antara proses bisnis dan infrastruktur TI. Ketidaksesuaian tersebut sering kali muncul akibat lemahnya tata kelola TI (IT Governance), seperti tidak adanya kebijakan standar, lemahnya pengawasan, serta kurangnya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan audit yang mampu mengidentifikasi kesenjangan tersebut secara sistematis (Haes & Van Grembergen, 2009).

Salah satu kerangka kerja yang banyak digunakan untuk melakukan audit terhadap sistem informasi dan menilai kapabilitas tata kelola TI adalah COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology). COBIT menyediakan panduan dan indikator pengukuran untuk mengevaluasi bagaimana TI dikelola, diarahkan, dan diawasi agar mendukung tujuan bisnis organisasi. Dengan struktur domain yang terstandarisasi, seperti EDM (Evaluate, Direct and Monitor) dan MEA (Monitor, Evaluate and Assess), COBIT menjadi acuan yang diakui secara global dalam praktik audit TI (ISACA, 2012).

Meski kerangka kerja COBIT telah banyak digunakan, implementasi nyata di lapangan masih menemui berbagai kendala. Beberapa organisasi masih belum mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip COBIT secara utuh karena keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan auditor internal, hingga resistensi terhadap perubahan. Hal ini menunjukkan perlunya studi yang lebih dalam mengenai efektivitas audit sistem informasi berbasis COBIT dalam memperbaiki tata kelola TI di lingkungan organisasi tertentu (Alreemy et al., 2016).

Dengan melakukan audit sistem informasi menggunakan pendekatan COBIT, organisasi dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan sistem yang dimiliki, sekaligus menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan strategis terkait manajemen TI. Penelitian ini relevan dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi (Ali & Green, 2007).

Tinjauan Pustaka

1. Audit Sistem Informasi

Audit sistem informasi merupakan proses sistematis untuk menilai dan mengevaluasi kontrol, keamanan, keandalan, serta efektivitas sistem informasi dalam mendukung kegiatan operasional dan tujuan strategis organisasi. Audit ini mencakup pemeriksaan terhadap infrastruktur teknologi, aplikasi, serta kebijakan dan prosedur terkait penggunaan TI. Audit yang efektif akan memberikan nilai tambah berupa perbaikan tata kelola, efisiensi proses, serta mitigasi risiko sistem informasi (Purbohadi & Fadhil, 2021).

2. IT Governance (Tata Kelola TI)

IT Governance adalah struktur hubungan dan proses yang mengarahkan dan mengendalikan penggunaan teknologi informasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui penciptaan nilai serta pengelolaan risiko yang berkaitan dengan TI. Tata kelola TI mencakup perencanaan strategis, pengukuran kinerja TI, pengelolaan sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan yang diterapkan. Tanpa tata kelola TI yang memadai, sistem informasi rentan mengalami ketidaksesuaian dengan kebutuhan organisasi (Susanto, 2022).

3. Kerangka Kerja COBIT

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) merupakan model referensi global yang dikembangkan oleh ISACA untuk tata kelola dan manajemen TI. COBIT

menyediakan domain dan proses yang memungkinkan organisasi melakukan evaluasi dan perbaikan sistem TI secara terstruktur. Versi terbaru dari COBIT (COBIT 5 dan COBIT 2019) menitikberatkan pada prinsip alignment antara TI dan bisnis, serta kapabilitas proses dalam pencapaian tujuan strategis organisasi (Putri & Hidayat, 2022).

4. Hubungan Audit Sistem Informasi dan IT Governance

Audit sistem informasi berperan penting dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja tata kelola TI, terutama dalam memastikan bahwa sistem informasi berjalan sesuai kebijakan dan tujuan organisasi. Melalui audit berbasis COBIT, auditor dapat mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi eksisting dengan praktik terbaik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses dan struktur TI. Dengan demikian, audit sistem informasi merupakan alat kontrol yang esensial dalam meningkatkan kapabilitas tata kelola TI (Rahardjo & Susilo, 2021).

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan hasil temuan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dikembangkan sebagai berikut:

H1: Audit sistem informasi berbasis COBIT berpengaruh positif terhadap peningkatan tata kelola teknologi informasi (IT Governance) dalam organisasi.

Hipotesis ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa audit sistem informasi yang dilakukan secara sistematis dan berbasis model referensi yang terstandarisasi (COBIT) dapat mengidentifikasi kelemahan sistem, meningkatkan efektivitas pengendalian, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan TI organisasi.

2 METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi kondisi tata kelola TI melalui proses audit sistem informasi. Pendekatan ini dipilih agar dapat menghasilkan data terukur tentang tingkat kapabilitas tata kelola TI berdasarkan kerangka kerja COBIT.



Gambar 1. Prinsip Kunci COBIT 5.0

2. Rancangan Kegiatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu: (1) studi literatur terhadap konsep audit sistem informasi dan IT governance, (2) penentuan domain COBIT yang digunakan, (3) penyusunan instrumen audit sesuai proses COBIT, (4) pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara, (5) analisis data dan pemetaan tingkat kapabilitas, serta (6) penyusunan rekomendasi perbaikan.

3. Ruang Lingkup dan Objek Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah tata kelola teknologi informasi pada organisasi atau institusi tertentu, yang telah mengimplementasikan sistem informasi dalam kegiatan operasionalnya. Objek dalam penelitian ini meliputi domain proses dalam kerangka COBIT 5 atau COBIT 2019, seperti Evaluate, Direct and Monitor (EDM), Align, Plan and Organize (APO), Build, Acquire and Implement (BAI), Deliver, Service and Support (DSS), dan Monitor, Evaluate and Assess (MEA).

4. Bahan dan Alat Utama Penelitian

Bahan utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui kuesioner dan wawancara. Alat utama yang digunakan adalah instrumen audit berdasarkan proses COBIT yang telah disesuaikan, perangkat lunak untuk pengolahan data (seperti Microsoft Excel atau SPSS), dan dokumentasi pendukung (manual sistem, SOP, laporan TI).

5. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada instansi atau organisasi yang menjadi objek studi, misalnya sebuah universitas, rumah sakit, atau perusahaan yang telah menerapkan sistem informasi secara formal. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama 2–3 bulan, dimulai dari pengumpulan data hingga analisis dan pelaporan hasil.

6. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua teknik pengumpulan data utama yang digunakan: Kuesioner: Disusun berdasarkan indikator proses pada COBIT, untuk mengukur tingkat kapabilitas tiap domain TI melalui penilaian internal stakeholder. Wawancara: Dilakukan kepada pihak manajemen dan pengguna sistem untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan TI, kendala, dan praktik pengelolaan TI sehari-hari.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Terdapat dua variabel utama dalam penelitian ini:

Audit Sistem Informasi: Proses evaluasi terhadap sistem informasi organisasi, diukur berdasarkan keterpenuhan proses COBIT, dinilai pada skala tingkat kapabilitas (maturity level) dari level 0 hingga level 5.

IT Governance (Tata Kelola TI): Kemampuan organisasi dalam mengarahkan dan mengendalikan penggunaan TI secara strategis dan operasional, yang diukur melalui domain COBIT yang relevan seperti EDM dan MEA.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, dengan menghitung skor rata-rata dari setiap domain COBIT yang diaudit, lalu memetakannya ke dalam model Capability Level COBIT (level 0–5). Hasil ini selanjutnya dibandingkan dengan target kapabilitas organisasi untuk melihat gap dan area perbaikan. Jika memungkinkan, dilakukan juga pengujian korelasi antara variabel audit sistem informasi dan tingkat IT governance menggunakan analisis statistik sederhana.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Audit Sistem Informasi

Audit sistem informasi dilakukan dengan menggunakan framework COBIT 5, mencakup lima domain utama:

- EDM (Evaluate, Direct and Monitor)
- APO (Align, Plan and Organize)
- BAI (Build, Acquire and Implement)
- DSS (Deliver, Service and Support)
- MEA (Monitor, Evaluate and Assess)

Instrumen audit berupa kuesioner dan wawancara diberikan kepada responden yang terdiri dari manajer TI, staf operasional, dan pengguna akhir sistem. Penilaian dilakukan berdasarkan

tingkat kapabilitas proses (*capability level*) dengan rentang Level 0 (non-existent) hingga Level 5 (optimized).

Tabel berikut merangkum hasil penilaian kapabilitas untuk masing-masing domain COBIT:

Domain COBIT	Nilai Rata-rata	Level Kapabilitas
EDM	2.4	Managed
APO	2.1	Managed
BAI	1.8	Defined
DSS	2.6	Managed
MEA	1.9	Defined

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa sebagian besar domain berada pada Level 2 (Managed), artinya proses telah dijalankan dan dipantau, namun belum terdokumentasi secara menyeluruh dan belum ada pengendalian mutu yang terstandarisasi. Domain BAI dan MEA masih berada pada Level 1-2, menunjukkan adanya kekurangan dalam perencanaan implementasi serta evaluasi berkelanjutan.

Pembahasan

a. Kesesuaian Audit dengan Target IT Governance

Audit sistem informasi yang dilakukan menggunakan pendekatan COBIT menunjukkan bahwa implementasi tata kelola teknologi informasi di organisasi belum sepenuhnya sesuai dengan target ideal IT Governance. Secara teori, governance TI yang efektif harus mampu memastikan bahwa TI mendukung tujuan bisnis, mengelola risiko TI secara tepat, serta mengoptimalkan sumber daya teknologi informasi. Namun, hasil audit memperlihatkan bahwa sebagian besar domain COBIT berada pada Level 2 (Managed), sedangkan standar minimum yang diharapkan untuk organisasi modern adalah Level 3 (Established) atau lebih tinggi agar proses bersifat formal, terdokumentasi, dan konsisten.

Ketidaksesuaian ini dapat dilihat pada domain APO (Align, Plan and Organize) dan BAI (Build, Acquire and Implement) yang seharusnya menjadi pilar utama dalam perencanaan strategis dan pengadaan teknologi. Rendahnya tingkat kapabilitas pada domain ini menunjukkan bahwa perencanaan jangka panjang TI belum dikembangkan secara terstruktur, serta belum ada integrasi menyeluruh antara strategi TI dengan strategi bisnis organisasi. Hal ini menyebabkan IT Governance tidak mampu berfungsi secara optimal dalam mendukung arah dan prioritas organisasi (Susanto, 2022).

Selanjutnya, pada domain EDM (Evaluate, Direct and Monitor), nilai kapabilitas yang belum mencapai level optimal mengindikasikan lemahnya pengawasan strategis oleh manajemen puncak terhadap investasi dan operasional TI. Padahal, dalam kerangka COBIT, domain EDM berperan penting dalam memastikan bahwa keputusan strategis tentang TI berada dalam kendali yang tepat. Ketidakterlibatan manajemen secara langsung dalam evaluasi dan pengendalian ini menjadi penyebab utama mengapa IT Governance tidak mampu berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Putri & Hidayat, 2022).

Kelemahan yang juga menonjol terdapat pada domain MEA (Monitor, Evaluate and Assess), yang menunjukkan lemahnya mekanisme evaluasi internal terhadap kinerja TI. Ketiadaan pengukuran yang sistematis membuat organisasi kesulitan untuk mengetahui apakah TI sudah memberikan nilai tambah atau justru menjadi beban biaya. Padahal, salah satu prinsip utama dalam governance adalah value delivery, yaitu memastikan bahwa TI memberi kontribusi nyata terhadap efisiensi dan efektivitas operasional. (Rahardjo & Susilo, 2021).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesesuaian antara praktik yang ada dengan target IT Governance, organisasi perlu melakukan transformasi menyeluruh dalam tata kelola TI. Ini mencakup pengembangan kebijakan formal, penetapan peran dan tanggung jawab TI yang jelas, peningkatan dokumentasi proses, dan integrasi penuh antara TI dan strategi bisnis.

COBIT, sebagai model referensi global, menyediakan kerangka kerja yang dapat dijadikan panduan agar setiap proses TI selaras dengan tujuan organisasi, terukur dengan jelas, dan memiliki kontrol serta akuntabilitas yang kuat (Nugroho & Ramli, 2022).

b. Dominasi Level Managed (Level 2)

Hasil audit menunjukkan bahwa sebagian besar domain dalam kerangka COBIT berada pada Level 2 (Managed), yaitu tahap di mana proses-proses TI telah direncanakan dan dijalankan, tetapi belum didokumentasikan secara formal dan belum distandardisasi di seluruh organisasi. Ciri utama dari level ini adalah adanya kesadaran organisasi terhadap pentingnya proses TI, namun implementasinya masih sangat bergantung pada inisiatif individu atau kelompok kecil di dalam unit kerja TI. Artinya, meskipun kegiatan-kegiatan TI berjalan secara rutin, belum terdapat mekanisme kontrol internal dan dokumentasi proses yang terintegrasi secara menyeluruh (Susanto, 2022).

Dominasi level 2 ini menjadi tanda bahwa pengelolaan TI masih bersifat taktis-operasional, bukan strategis. Beberapa organisasi cenderung melakukan pengelolaan berbasis kebutuhan sesaat atau proyek jangka pendek, tanpa memikirkan kelangsungan dan kesinambungan proses dalam jangka panjang. Hal ini terlihat dari belum adanya kerangka kebijakan formal, SOP yang terdokumentasi, maupun indikator kinerja utama (KPI) yang ditetapkan untuk mengevaluasi efektivitas fungsi TI. Dengan demikian, pengelolaan TI belum mampu sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi strategi bisnis organisasi (Putri & Hidayat, 2022).

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa proses-proses pengelolaan TI belum terstandarisasi antar unit kerja atau departemen. Dalam beberapa kasus, unit TI memiliki cara kerja yang berbeda-beda tergantung pada penanggung jawab masing-masing proyek, sehingga menghasilkan inkonsistensi layanan TI. Ketidakteraturan ini akan memunculkan risiko yang cukup besar, terutama jika terjadi pergantian personel, perubahan sistem, atau ekspansi organisasi. Standarisasi proses sangat diperlukan agar semua fungsi TI dapat berjalan stabil dan bisa direplikasi tanpa mengandalkan personel tertentu (Wulandari & Siregar, 2020).

Selain itu, kapabilitas di Level 2 mengindikasikan bahwa organisasi telah memiliki upaya monitoring proses, namun pemantauan tersebut belum bersifat sistematis dan belum dilandasi oleh pengumpulan data berbasis indikator yang jelas. Monitoring yang dilakukan lebih sering bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah terjadi gangguan atau permasalahan. Untuk dapat naik ke Level 3 (Established), organisasi perlu mendesain sistem monitoring dan evaluasi internal yang berbasis data, dengan keterlibatan pengguna dan manajemen dalam proses penilaian kinerja teknologi (Ramadhani & Dewi, 2022).

Dengan mayoritas domain COBIT berada di Level 2, maka arah pengembangan organisasi harus difokuskan pada upaya dokumentasi, pengembangan kebijakan, serta integrasi proses antar unit kerja TI. Organisasi juga perlu menanamkan budaya tata kelola dan manajemen risiko dalam seluruh proses TI agar tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan strategis jangka panjang. Transformasi ini hanya dapat dicapai melalui komitmen manajemen, pelatihan SDM TI, dan penggunaan tools audit serta evaluasi yang konsisten (Nugroho & Ramli, 2022).

c. Kelemahan di Domain MEA dan BAI

Domain MEA (Monitor, Evaluate and Assess) memiliki peran strategis dalam mengukur kinerja TI, menilai efektivitas kontrol internal, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan eksternal maupun kebijakan internal. Namun, hasil audit menunjukkan bahwa domain ini berada di bawah level kapabilitas yang diharapkan, yaitu masih berada di Level 1, bahkan mendekati Level 0 pada beberapa proses. Artinya, proses monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan TI dilakukan secara ad hoc, tanpa sistem pengukuran kinerja yang terstruktur dan berkelanjutan. Akibatnya, organisasi tidak memiliki dasar data yang kuat untuk menilai apakah investasi dan aktivitas TI telah sesuai dengan target strategis (Putri & Hidayat, 2022).

Kelemahan lainnya dalam domain MEA adalah belum adanya indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas layanan TI. Beberapa unit kerja memang melakukan evaluasi, tetapi bersifat insidental dan tidak terdokumentasi secara sistematis. Ketiadaan pelaporan formal mengenai pencapaian TI menyebabkan keputusan manajemen terkait pengembangan TI cenderung tidak berbasis data. Hal ini juga memperbesar risiko pengambilan keputusan yang tidak tepat, serta menurunkan kemampuan organisasi dalam menerapkan prinsip continuous improvement (Wulandari & Siregar, 2020).

Sementara itu, domain BAI (Build, Acquire and Implement) juga menunjukkan kelemahan signifikan. Hasil audit menunjukkan bahwa organisasi belum memiliki perencanaan dan pelaksanaan yang terstruktur dalam pengadaan, pembangunan, maupun implementasi sistem informasi. Banyak proyek TI yang dilakukan tanpa dokumentasi proyek formal, tidak ada analisis kebutuhan pengguna secara menyeluruh, dan tanpa uji coba (testing) yang memadai sebelum sistem diluncurkan. Akibatnya, sistem yang diimplementasikan sering tidak memenuhi harapan pengguna atau justru menimbulkan gangguan baru dalam proses bisnis (Rahardjo & Susilo, 2021).

Selain itu, kurangnya standar implementasi dalam domain BAI menyebabkan tidak adanya pengendalian mutu terhadap sistem informasi yang dikembangkan. Tidak ditemukan bukti adanya manajemen risiko proyek TI, dokumentasi tahapan proyek, atau pengujian keamanan sistem sebelum implementasi. Hal ini memperlihatkan bahwa organisasi belum memiliki pendekatan yang formal terhadap manajemen proyek TI, padahal domain BAI sangat bergantung pada ketepatan waktu, efisiensi biaya, dan keberhasilan integrasi sistem baru dengan proses bisnis yang sudah berjalan (Nugroho & Ramli, 2022).

Kelemahan di domain MEA dan BAI ini menjadi hambatan besar bagi organisasi dalam mencapai tata kelola TI yang efektif. Tanpa evaluasi kinerja yang jelas dan proses implementasi sistem yang baik, organisasi akan kesulitan untuk menciptakan nilai tambah dari penggunaan teknologi informasi. Oleh karena itu, perbaikan di kedua domain ini perlu menjadi prioritas utama, dengan memulai dari penyusunan kebijakan formal, pelatihan manajemen proyek TI, serta pengembangan sistem evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur. Langkah-langkah ini sangat penting agar organisasi dapat naik ke Level 3 (Established) dalam kerangka COBIT dan memenuhi prinsip-prinsip dasar dari IT Governance (Firmansyah & Nugroho, 2021).

d. Dampak terhadap IT Governance

Hasil audit sistem informasi dengan pendekatan COBIT menunjukkan bahwa kondisi tata kelola TI di organisasi masih belum mencapai tingkat kematangan yang ideal. Sebagian besar domain COBIT berada pada Level 2 (Managed), yang berarti proses telah dijalankan namun belum distandardisasi atau terdokumentasi secara menyeluruh. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kontrol terhadap sistem informasi dan berisiko terhadap ketidaksesuaian antara strategi TI dengan arah bisnis organisasi secara keseluruhan. Tata kelola TI yang lemah pada akhirnya menurunkan efektivitas peran TI sebagai pendorong kinerja organisasi (Putri & Hidayat, 2022).

Keterbatasan dalam dokumentasi dan pemantauan proses TI juga menghambat kemampuan organisasi dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan TI. Tanpa indikator kinerja yang terukur dan mekanisme evaluasi berkelanjutan, organisasi tidak dapat mengetahui sejauh mana TI telah mendukung pencapaian tujuan strategis. Ini menunjukkan bahwa prinsip dasar IT Governance, yaitu value delivery and performance measurement, belum terpenuhi secara optimal. Ketidakhadiran data evaluatif juga memperbesar kemungkinan terjadinya pemborosan sumber daya TI (Wulandari & Siregar, 2020).

Selain itu, dampak lainnya terlihat dari rendahnya keterlibatan manajemen puncak dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan terkait TI. Domain EDM (Evaluate, Direct and Monitor), yang seharusnya menunjukkan kepemimpinan dan pengawasan strategis, juga belum menunjukkan kapabilitas yang kuat. Hal ini menyebabkan keputusan strategis TI hanya

bertumpu pada tingkat operasional, tanpa sinergi dengan arah jangka panjang organisasi. Dalam konteks tata kelola TI, kondisi ini menciptakan jarak antara visi bisnis dengan implementasi teknologi (Rahardjo & Susilo, 2021).

Dampak dari lemahnya governance juga dapat dirasakan dalam hal manajemen risiko TI. Hasil audit menunjukkan bahwa proses identifikasi, mitigasi, dan evaluasi risiko masih dilakukan secara tidak sistematis. Domain MEA, yang seharusnya mengatur mekanisme pengawasan dan kepatuhan, belum dijalankan secara optimal. Ini berpotensi menimbulkan risiko yang tidak terdeteksi, seperti kegagalan sistem, kebocoran data, atau penyalahgunaan aset digital. Akibatnya, organisasi lebih reaktif dalam menghadapi masalah TI daripada proaktif mencegahnya (Nugroho & Ramli, 2022).

Secara keseluruhan, dampak dari rendahnya tingkat kematangan dalam proses TI mengindikasikan bahwa IT Governance di organisasi belum berfungsi sebagai instrumen strategis. TI belum menjadi bagian dari pengambilan keputusan bisnis yang terintegrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi tata kelola TI dengan meningkatkan kapabilitas proses menuju Level 3 (Established), yang meliputi standarisasi, dokumentasi, dan integrasi proses antar unit. Dengan perbaikan ini, IT Governance dapat mendukung pencapaian efisiensi, efektivitas, dan keunggulan kompetitif organisasi secara berkelanjutan (Firmansyah & Nugroho, 2021).

4 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit sistem informasi menggunakan pendekatan COBIT, ditemukan bahwa sebagian besar domain tata kelola TI di organisasi berada pada level kapabilitas Level 2 (Managed). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses TI telah dijalankan namun belum terdokumentasi secara formal dan belum distandardisasi secara menyeluruh. Hal ini berdampak langsung terhadap efektivitas tata kelola TI, yang belum mampu mendukung strategi bisnis secara optimal, serta menunjukkan lemahnya integrasi antara proses TI dengan tujuan organisasi. Kelemahan khusus teridentifikasi pada domain MEA (monitoring dan evaluasi) dan BAI (pengembangan dan implementasi sistem), yang keduanya berperan penting dalam menjaga kualitas, efisiensi, dan pengawasan TI.

Ketiadaan standar, dokumentasi, serta kurangnya keterlibatan manajemen strategis dalam pengambilan keputusan TI menyebabkan IT Governance belum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk meningkatkan efektivitas tata kelola TI, organisasi perlu memperkuat dokumentasi, menyusun kebijakan formal, mengembangkan indikator kinerja, serta memperkuat kapabilitas proses hingga mencapai Level 3 (Established). Dengan peningkatan tersebut, sistem informasi dapat memberikan nilai tambah nyata, mengelola risiko secara efektif, dan mendukung pencapaian tujuan bisnis secara berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] Ali, S., & Green, P. (2007). IT governance mechanisms in public sector organizations: An Australian context. *Journal of Enterprise Information Management*, 20(4), 400–416.
- [2] Alreemy, Z., Chang, V., Walters, R., & Wills, G. (2016). Critical success factors (CSFs) for information technology governance (ITG). *International Journal of Information Management*, 36(6), 907–916.
- [3] Firmansyah, R., & Nugroho, A. (2021). Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 pada Instansi Pemerintahan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 7(2), 115–124.

- [4]Gelinas, U. J., Dull, R. B., & Wheeler, P. R. (2018). *Accounting Information Systems*. Cengage Learning.
- [5]Haes, S. D., & Van Grembergen, W. (2009). An exploratory study into IT governance implementations and its impact on business/IT alignment. *Information Systems Management*, 26(2), 123–137.
- [6]ISACA. (2012). *COBIT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT*. Rolling Meadows, IL: ISACA.
- [7]Nugroho, H., & Ramli, M. (2022). Penerapan Framework COBIT dalam Menilai Kematangan Tata Kelola TI pada Institusi Pendidikan Tinggi. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 10(1), 30–40.
- [8]Putri, L. N., & Hidayat, A. (2022). Audit Sistem Informasi Berbasis COBIT 5 untuk Evaluasi Governance TI pada Perusahaan Logistik. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, 18(1), 55–66.
- [9]Putri, R. A., & Hidayat, A. (2022). Audit Sistem Informasi Perpustakaan Digital Menggunakan Framework COBIT 5. *Jurnal Sistem Informasi*, 8(1), 45–53.
- [10]Purbohadi, A., & Fadhil, A. (2021). Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 pada PT X. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 9(1), 23–31.
- [11]Rahardjo, A. S., & Susilo, A. (2021). Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 9(2), 112–120.
- [12]Rahardjo, D., & Susilo, R. (2021). Analisis Domain EDM dan MEA pada COBIT 5 dalam Menilai Kinerja Sistem Informasi. *Jurnal Sistem dan Informatika*, 13(3), 142–153.
- [13]Susanto, A. (2022). Tata Kelola Teknologi Informasi: Konsep dan Implementasi COBIT dalam Organisasi. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 10(2), 67–75.
- [14]Wulandari, R., & Siregar, R. (2020). Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan COBIT 5 pada Sektor Perbankan. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 6(2), 88–97.